



ANALISIS PENGARUH DBH, DAU, DAK TERHADAP PDRB ADHK 2010 DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB TAHUN 2011–2024

Nia Oktaviana¹ Baiq Saripta Wijimulawiani² Muhammad Dzul Fadlli³

Article history:

Submitted: 2 September 2025

Revised: 26 Januari 2026

Accepted: 31 Januari 2026

Keywords:

General Allocation Fund;
Gross Regional Domestic
Product;
Revenue Sharing Fund;
Special Allocation Fund;

Kata Kunci:

Dana Alokasi Khusus;
Dana Alokasi Umum;
Dana Bagi Hasil;
Produk Domestik Regional
Bruto;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram, Nusa
Tenggara Barat, Indonesia
Email:
nia.oktariana9998@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2010 prices across regencies/cities in West Nusa Tenggara (NTB) Province during the period 2011–2024. NTB was selected as the study area due to its relatively high fiscal dependence on central government transfers and the persistent disparities in economic growth among its districts. These characteristics make NTB a relevant empirical context for evaluating the effectiveness of intergovernmental fiscal transfers in promoting regional economic performance. Panel data regression with a Fixed Effect Model was employed using 140 observations. The results indicate that DBH, DAU, and DAK have positive and statistically significant effects on GRDP. These findings suggest that fiscal transfers function not only as instruments of fiscal equalization but also as key drivers of regional economic growth when allocated productively. The scientific contribution of this study lies in providing long-term empirical evidence on the role of intergovernmental transfers in a developing province, thereby enriching the literature on fiscal decentralization in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2011–2024. Provinsi NTB dipilih karena memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana perimbangan pusat serta masih menghadapi disparitas pertumbuhan ekonomi antardaerah. Kondisi tersebut menjadikan NTB sebagai konteks empiris yang relevan untuk menguji efektivitas transfer fiskal dalam mendorong kinerja ekonomi regional. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* terhadap 140 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan berperan tidak hanya sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris jangka panjang mengenai peran transfer fiskal di provinsi berkembang, sekaligus memperkaya literatur desentralisasi fiskal di Indonesia.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{2,3}

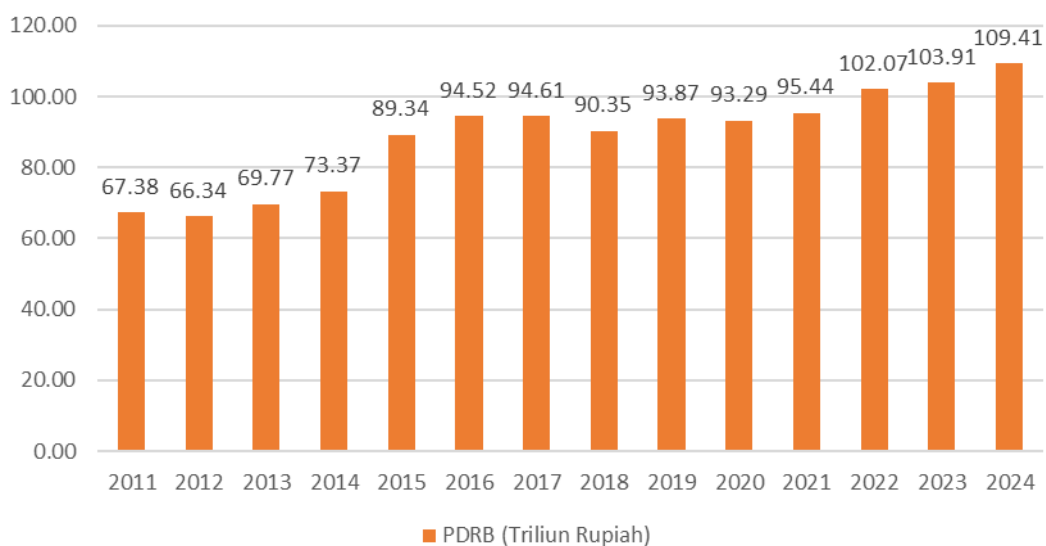
Email: baiqsariptaw@unram.ac.id²

Email: fadlli@unram.ac.id³

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah indikator yang paling penting yang mana berfokus dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi dan penting untuk menilai keberhasilan pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kedepannya. Maka, proses meningkatnya pertumbuhan ekonomi ialah fokus utama pemerintah daerah setiap tahunnya (Hartadi, 2022).

Menurut Sukirno (2004), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah akumulasi nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator statistik yang dapat dipergunakan menilai kinerja ekonomi makro di wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, dan analisis terhadap PDRB Harga konstan digunakan sebagai acuan untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode. Berikut merupakan tabel perkembangan PDRB di Provinsi NTB Tahun 2011-2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Provinsi NTB Tahun 2011-2024

Gambar 1 menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas dasar harga konstan tahun 2010 selama periode 2011 hingga 2024. Secara umum, data ini memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan cenderung meningkat, walaupun terdapat beberapa fluktuasi. Pada tahun 2011, nilai PDRB NTB tercatat sebesar Rp67,38 triliun dan sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012 menjadi Rp66,34 triliun. Namun, sejak tahun 2013 hingga 2017, PDRB menunjukkan kenaikan yang konsisten, hingga mencapai Rp94,61 triliun pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018 dan 2019, nilai PDRB mengalami sedikit penurunan dan stagnasi, yakni menjadi Rp90,35 triliun dan Rp93,87 triliun. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi menjadi Rp93,29 triliun, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meski demikian, perekonomian NTB menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 mencatatkan peningkatan PDRB menjadi Rp95,44 triliun dan terus tumbuh pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi Rp102,07 triliun dan Rp103,91 triliun, kemudian pada tahun 2024 nilai PDRB mencapai Rp109,41 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Provinsi NTB mengalami pertumbuhan riil yang cukup stabil dalam jangka panjang, meskipun sempat terdampak oleh krisis global. Tren pertumbuhan ini mencerminkan adanya perbaikan

kinerja ekonomi daerah serta menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut.

Menurut Oates (2011), desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri secara lebih baik dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat setempat karena mereka memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana keuangan secara langsung. Instrumen fiskal seperti DBH, DAU, dan DAK menjadi komponen penting dalam mendukung kinerja ekonomi daerah. Desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi alokasi, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kata lain, apabila pengelolaan ketiga komponen fiskal tersebut oleh pemerintah daerah dilakukan secara optimal, maka hal ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tiga ukuran utama yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal yaitu pendapatan terdiri atas PAD, transfer fiskal berupa dana perimbangan, dan belanja pemerintah daerah sebagai bentuk pengeluaran (Fauziah & Sutrisno, 2025).

Peningkatan PDRB tidak terlepas dari perkembangan aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, jumlah kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi cenderung mengalami kenaikan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah, mengingat sektor-sektor yang menjadi objek pajak daerah merupakan bagian integral dari komponen penyusun PDRB (Saniah & Murtala, 2023). Menurut Ika *et al.*, (2020), penyaluran anggaran daerah yang diarahkan pada program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan warga memungkinkan pemerintah daerah untuk memfokuskan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kemudian kualitas layanan publik. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang sangat bagus dan berkelanjutan dengan tujuan dapat berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperkuat kapasitas produksi melalui berbagai proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta program-program yang secara langsung menyasar daerah tertinggal (Pratama & Utama, 2019). Alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Jumlah pengeluaran ini bergantung pada penerimaan daerah, sehingga mencerminkan sejauh mana peningkatan kualitas SDM dapat diwujudkan (Wardhana *et al.*, 2022).

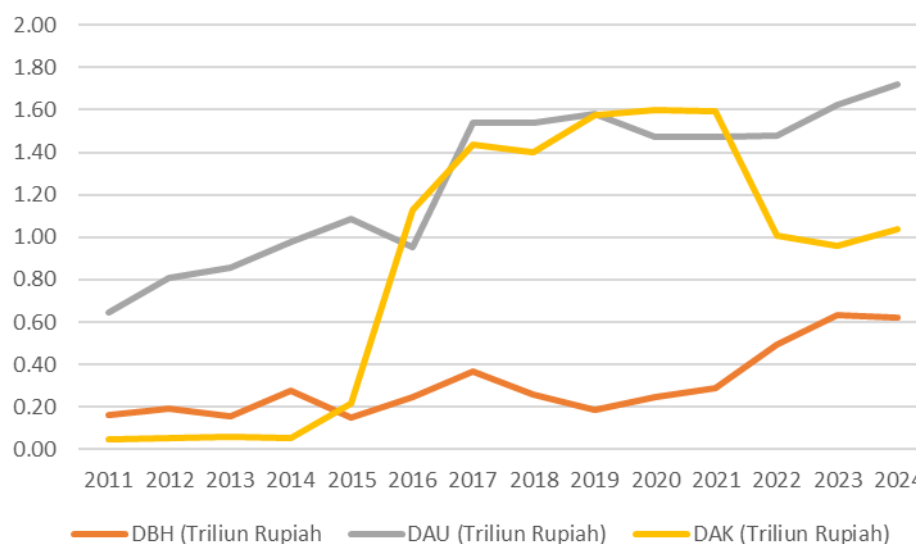
Dalam kebijakan fiskal, pengeluaran negara dikategorikan sebagai salah satu instrumen yang paling penting, yaitu upaya pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui penetapan jumlah pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Kebijakan ini yang direalisasikan dalam bentuk APBN sebagai anggaran nasional dan APBD sebagai anggaran pemerintahan daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga kestabilan harga, meningkatkan produksi, memperluas lapangan kerja, serta menginisiasi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi dan investasi akan berdampak langsung terhadap meningkatnya penerimaan negara, terutama melalui pajak. Dengan penerimaan yang lebih besar, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menambah alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen stimulus untuk mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, dalam kerangka teori pengeluaran, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan meningkatkan kapasitas belanja pemerintah, sementara belanja pemerintah juga menjadi motor penting bagi pertumbuhan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi (Mankiw, 2016).

Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas perekonomian melalui perencanaan penerimaan dan belanja negara secara tahunan. Kebijakan ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) di tingkat regional. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan tingkat output dan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sukirno, 2004).

Teori desentralisasi fiskal menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah meningkatkan kinerja ekonomi regional melalui efisiensi alokasi sumber daya publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Oates, 2011). Oleh karena itu, DBH, DAU, dan DAK dipandang sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat kapasitas fiskal daerah dan berperan dalam mendorong peningkatan PDRB. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih efisien melalui langkah-langkah strategis dalam menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah melalui pengalokasian dana APBN. Dana perimbangan yang merupakan bagian dari alokasi APBN terdiri atas DBH, DAU, dan DAK. Dana-dana tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di daerah (Nurkodri *et al.*, 2023). Berikut adalah grafik yang menampilkan besaran DBH, DAU, dan DAK Provinsi NTB.



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2025

Gambar 2. Realisasi DBH, DAU, DAK, Provinsi NTB 2011-2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi keuangan APBN yang dibagikan untuk daerah yang mana dibedakan dalam jumlah tertentu untuk mendukung terlaksananya desentralisasi. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengikuti prinsip yaitu aktual penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. DBH terbagi menjadi dua jenis, DBH Pajak (meliputi PBB, PPh, dan CHT) serta DBH Sumber Daya Alam (meliputi kehutanan, pertambangan, migas, panas bumi, dan perikanan) (DJPK Kemenkeu, 2017).

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah bantuan dana tidak terikat yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota dengan maksud menutup perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembiayaan daerah (Kuncoro, 2004). Alokasinya didasarkan pada formula tertentu berpegang pada prinsip keadilan fiskal, daerah yang belum berkembang dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah seharusnya memperoleh pembiayaan dana yang berdampak signifikan melebihi wilayah yang sudah berkembang. Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah keuangan yang dibiayai oleh anggaran negara dan ditujukan untuk daerah yang mana berfungsi mendanai aktivitas tertentu yang menjadi wewenang pemerintah daerah, seperti dalam bentuk kegiatan fisik maupun nonfisik. DAK bersifat bantuan khusus (*specific grant*) yang penggunaannya ditujukan untuk mendukung program-program spesifik yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sejalan dengan prioritas nasional, dan/atau merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (DJA Kemenkeu, 2002).

Meskipun hubungan antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB (Maghfirah & Andriyani, 2022; Mukiwihando, 2020; Sulaeman & Andriyanto, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Kamidin *et al.*, 2025; Noviasari & Alich, 2021; Nurkodri *et al.*, 2023). Selain itu, Priambodo & Hidayat (2024) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan adanya *research gap* terkait efektivitas dana perimbangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada konteks wilayah dengan karakteristik fiskal yang berbeda.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah yang relevan untuk dikaji karena memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap dana transfer pusat serta menunjukkan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota. Meskipun seluruh daerah di NTB menerima alokasi DBH, DAU, dan DAK, pertumbuhan PDRB masih belum merata. Beberapa daerah berkembang pesat karena sektor unggulan seperti pertambangan dan pariwisata, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Selain itu, pemanfaatan dana transfer masih cenderung didominasi oleh belanja rutin dibandingkan investasi produktif, sehingga efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Berdasarkan *research gap* dan kondisi empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2011–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperjelas peran dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi dasar evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat regional.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan data panel dikumpulkan dari tahun 2011 hingga 2024. Dalam studi ini, peneliti didasarkan pada informasi sekunder yang diambil dari beberapa lembaga dan publikasi resmi, studi ini memanfaatkan data yang dikategorikan sebagai sekunder dan didapat dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Data APBD diperoleh melalui portal data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan Lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Terdapat 140 observasi total dalam penelitian ini. Menurut Gujarati & Porter (1992) Proses pemilihan teknik estimasi yang tepat dalam regresi dapat melibatkan tiga uji dalam pemilihan model diantara lain, yaitu *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *LM Test*. Uji Chow digunakan untuk memilih model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan pada data penelitian nanti. Sedangkan Uji Hausman bertujuan untuk memilih apakah model FEM atau *Random Effect Model* (REM), dan Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih model CEM dan REM. Studi ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews 12. Dengan model regresi dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$PDRB_{i,t} = \alpha + \beta_1 DBH_{i,t} + \beta_2 DAU_{i,t} + \beta_3 DAK_{i,t} + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

i : Sampel Kabupaten/Kota

t : Sampel Tahun

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi

PDRB : Pendapataan Domestik Regional Bruto

DBH : DBH

DAU : DAU

DAK : DAK

e : *Error Term*

Dalam analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), pengujian heteroskedastisitas dan multikolinearitas tetap relevan karena pelanggaran terhadap asumsi tersebut dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien dan inferensi statistik menjadi bias (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010). Selain itu, autokorelasi masih mungkin terjadi pada data panel yang memiliki dimensi runtut waktu (*time-series dominant*), sehingga perlu diperhatikan dalam analisis ekonometrika panel (Gujarati & Porter, 2009).

Namun, penelitian ini tidak melakukan uji autokorelasi dan uji normalitas residual secara eksplisit karena keterbatasan desain analisis dan fokus penelitian yang lebih menekankan pada hubungan struktural antar variabel. Oleh karena itu, hasil estimasi perlu diinterpretasikan secara hati-hati, khususnya terkait kemungkinan adanya autokorelasi dan distribusi residual yang tidak sepenuhnya normal. Keterbatasan ini menjadi salah satu batasan penelitian dan membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan yang lebih *robust*, seperti penerapan uji asumsi klasik secara lengkap (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi parsial (uji t), dan uji signifikansi simultan (uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh hasil estimasi regresi yang tepat pada data panel, maka diaplikasikan dua pengujian utama yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	Statistik	<i>d.f</i>	Prob.
<i>Cross-section F</i>	56,238132	(9,127)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	224,9113332	9	0,0000

Sumber: Data Diolah, 2025

Mengacu pada hasil pengujian di tabel 1, probabilitas yang diperoleh dari pengujian menunjukkan bahwa *Chi-Square* dari regresi *Fixed Effect* adalah 0,0000. Karena nilai ini berada di bawah batas signifikansi 5 persen, sebagai hasilnya, FEM lebih direkomendasikan diatas CEM. Oleh karena itu, model yang dipilih untuk sementara adalah FEM.

Tabel 2.
Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistik</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	Prob.
<i>Cross-section Chi-square</i>	40,640413	3	0,0000

Sumber: Data Diolah, 2025

Mengacu pada hasil pengujian di Tabel 2, diperoleh nilai probabilitas sejumlah 0,0000, karena nilai ini berada di bawah batas signifikansi 5 persen ($0,0000 < 0,05$), maka berdasarkan hasil uji tersebut metode *Fixed Effect Model* (FEM) dinyatakan sebagai model terbaik. Sehingga, pada Uji Chow maupun Uji Hausman menghasilkan bukti yang kuat untuk memilih model *Fixed Effect* dalam studi ini. Model yang direkomendasikan dalam studi ini adalah FEM, sebagaimana didukung oleh hasil pengujian pemilihan model. Hasil regresi FEM yang terpilih pada penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.
Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistik</i>	<i>Prob.</i>
C	3,86E+12	9,12E+11	4,230624	0,0000
DBH	7,765113	2,450592	3,168668	0,0019
DAU	5,392475	1,678936	3,21184	0,0017
DAK	4,377091	1,422737	3,076528	0,0026
<i>Cross-Section Fixed (Dummy Variables)</i>				
Durbin-Watson Stat.	1,1572	F-Statistik		109,109
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,903224	Prob (F-Statistik)		0,00000

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian yang menghasilkan persamaan regresi berikut :

$$\text{PDRB} = 3,86\text{E}+12 + 7,7765113\text{DBH} + 5,392475\text{DAU} + 4,3877091\text{DAK} \dots\dots\dots(2)$$

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dalam satuan miliar rupiah atas dasar harga konstan (ADHK 2010).

Dari model regresi tersebut, penelitian ini dapat dijelaskan dengan pernyataan bahwa nilai konstanta 3,860 Miliar yang artinya apabila Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0 atau *ceteris paribus*, maka jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata ialah Rp 3.860.000.000.000. Koefisien DBH sebesar 7,76 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DBH sebesar 1 Miliar Rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 7,76 Miliar Rupiah, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien variabel DAU sebesar 5,39 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 1 Miliar Rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 5,39 Miliar Rupiah dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien DAK sebesar 4,38 menunjukkan bahwa setiap peningkatan DBH sebesar 1 Miliar Rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 4,38 Miliar Rupiah dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil uji parsial (Uji t) ditemukan seluruh variabel dalam penelitian ini diukur dalam satuan miliar rupiah atas dasar harga konstan (ADHK 2010). Hasil estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer fiskal dari pemerintah pusat berkontribusi langsung terhadap kapasitas produksi daerah melalui peningkatan belanja publik dan aktivitas ekonomi regional.

Nilai yang diperoleh dari pengujian yang terdapat dalam Tabel 3, probabilitas F-statistik (0,0000) dengan probabilitas 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Ditolaknya H_0 dan penerimaan H_A dari temuan tersebut, dapat disimpulkan variabel independen DBH (X_1), DAU (X_2), dan DAK (X_3) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat berdampak signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan hasil statistik secara simultan. Berdasarkan nilai koefisien determinasi mengacu pada hasil pengujian pada Tabel 3 yang diperoleh sebesar 0,903224, sehingga besarnya pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap jumlah PDRB yaitu sebesar 0,903224 (90 Persen) dan 10 persen lainnya terdapat pengaruh dari variabel tak teramati diluar lingkup penelitian.

Hasil uji pengaruh DBH terhadap PDRB ditunjukkan dalam Tabel 3 yakni nilai koefisien variabel independen Dana Bagi Hasil (DBH) (X_1) sebesar 7.765113 dengan probabilitas sebesar 0,0019 menunjukkan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di NTB. Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Budiman et al. (2023), Priambodo & Hidayat (2024). Namun, penelitian ini memperkuat temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2022), Arniaty (2023). Menurut Mankiw (2016), Teori Keynesian berpendapat bahwa saat pendapatan atau penghasilan naik, yang pada akhirnya memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. DBH, khususnya dari pajak, berperan penting dalam peningkatan ekonomi daerah karena dirancang untuk mendistribusikan kembali pendapatan negara secara adil. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang kaya sumber daya alam

maupun yang tidak. DBH berorientasi pada peningkatan indikator-indikator kemakmuran seperti peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan, dan peningkatan infrastruktur publik.

Hasil uji pengaruh DAU terhadap PDRB ditunjukkan dalam Tabel 3 pada nilai koefisien variabel independen DAU (X2) sebesar 5,392475 dengan peluang sebesar 0,0017 menunjukkan bahwa variabel DAU Kabupaten/Kota di NTB berdampak signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan hasil statistik. Hasil studi ini selaras dengan riset yang diteliti oleh Gulo (2022), Agusiady (2021) & Sasea *et al.*, (2020). Pemerintah daerah akan mengalokasikan DAU yang diterima untuk membantu operasional PEMDA Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, termasuk dengan belanja modal untuk mendorong terjadinya peningkatan pada PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Maka, peningkatan DAU bagi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB akan mendorong kenaikan pada PDRB ekonomi daerah masing-masing.

Hasil uji pengaruh DAK terhadap PDRB ditunjukkan dalam Tabel 3 atau pada pengujian regresi nilai koefisien variabel independen DAK (X3) sebesar 4,377091 dengan probabilitas sebesar 0,0026 menunjukkan bahwa variabel DAK Kabupaten/Kota di NTB berdampak signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan PDRB berdasarkan hasil statistik. Hasil temuan ini selaras dengan riset yang diteliti oleh Lihu *et al.*, (2022) & Batubara & Gunarto (2024). Hasil temuan tersebut menyatakan bahwa peningkatan alokasi dan realisasi DAK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB oleh pemerintah pusat memiliki peran yang signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi realisasi DAK, maka semakin besar juga kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Investasi di sektor-sektor ini bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melainkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing wilayah. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dan penyaluran DAK menjadi faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan pembangunan antardaerah dan memperkuat basis ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Secara ekonomi, temuan ini menegaskan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat tidak hanya berdampak secara statistik, tetapi juga memiliki makna substantif dalam meningkatkan kapasitas produksi regional. Namun demikian, besarnya pengaruh masing-masing dana transfer berbeda-beda, yang mengindikasikan adanya variasi efektivitas dalam pemanfaatan DBH, DAU, dan DAK oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana perlu diiringi dengan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja yang lebih produktif agar dampaknya terhadap PDRB dapat lebih optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2011–2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dana perimbangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga sebagai faktor penggerak aktivitas ekonomi regional apabila dialokasikan pada sektor-sektor produktif. Perbedaan besarnya pengaruh DBH, DAU, dan DAK mencerminkan variasi efektivitas pemanfaatan dana transfer antar kabupaten/kota di Provinsi NTB, yang dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran dan prioritas belanja daerah.

Berdasarkan simpulan empiris, pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengarahkan pemanfaatan dana perimbangan secara lebih produktif dan berbasis prioritas sektor. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung

terhadap peningkatan PDRB, seperti infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola secara lebih efisien melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, dengan penekanan pada belanja modal dan program pembangunan yang mendorong produktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) perlu dimanfaatkan untuk mendukung diversifikasi ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan UMKM, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif agar ketergantungan terhadap sektor primer dapat dikurangi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengimplementasikan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan pengelolaan dana transfer yang terarah dan berbasis sektor produktif, kontribusi fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agusiady, R. (2021). Special allocation funds (DAK) & regional original income (PAD): How to manage and economic growth in Bandung Regency. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 534–541. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i1.263>
- Arniaty. (2023). *The Effect of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on Economic Growth* (Vol. 1, Number 1). <https://djpjb.kemenkeu.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha 2019–2023* (Nomor Publikasi 52000.24006; ISSN/ISBN 2354-7499). Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/04/04/6db48128c01401ff7fe1a5cd/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-nusa-tenggara-barat-menurut-lapangan-usaha-2019-2023.htm>
- Budiman, H., Arifuddin, Madris, & Sabir. (2023). *The effect of regional original income, Special Allocation Funds and General Allocation Funds on economic growth in Makassar City for the 2010–2021 period*. Dalam *Proceedings of the 7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022)* (hlm. 339–350). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_35
- DJA Kemenkeu. (2002). *Dana Alokasi Khusus*.
- DJPk Kemenkeu. (2017). *Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis*. djp.kemenkeu.go.id
- Fauziah, N., & Sutrisno, S. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017–2023. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 193. <https://doi.org/10.24843/EEB.2025.v14.i02.p05>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (1992). *Basic Econometrics* (fifth). The McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gulo, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Kuantan Singingi*. <https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v0i0>
- Hartadi, A. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota dalam wilayah Jawa Timur (tahun 2010–2019). *Diponegoro Journal of Economics*, 11(3), 163–? <https://doi.org/10.14710/djoe.34838>
- Ika, N. F., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://doi.org/10.14710/djoe.31536>
- Kamidin, L., Rahman, F., & Yusran, M. (2025). Efektivitas dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(1), 1–15.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Maghfirah, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 33–47.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th edition). Worth Publisher.
- Mukiwihando, R. (2020). *Dampak kebijakan Dana Alokasi Khusus pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 72–80. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i1.805>
- Batubara, M. N. H., & Gunarto, T. (2024). The influence of local own-source revenue, revenue sharing funds, and special allocation funds on GDRP in Pesisir Barat District, Lampung Province. *JSRET (Journal of Scientific Research, Economics, and Technology)*, 3(2).

- Noviasari, D., & Alich, M. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB kabupaten/kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(2), 89–102.
- Nurkodri, M. S., Amir, A., & Zamzami, Z. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 12(1), 29–38. <https://doi.org/10.22437/jesl.v12i1.24104>
- Nurkodri, N., Sari, R., & Putra, A. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(1), 55–70.
- Oates, Wallace E. (2011). *Fiscal Federalism* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v8i1.2279>
- Saniah, R., & Murtala, M. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15182>
- Sasea, G., Wurarah, R. N., & Guzali Tafalas, M. (2020). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Papua Barat 2014–2018 (studi kasus 10 kabupaten dan 1 kota). *Lensa Ekonomi*, 14(02), 44–59. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.81>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 651. <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p01>
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaeman, A., & Andriyanto, I. (2021). Dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 201–214.
- Lihu, M. V. S. R., Effendi, U., & Kusuma Negara, C. (2022). Revenue sharing concerning general allocation funds, special allocation funds, and regional autonomy for capital expenditures on economic growth. *Jurnal Ekonomi*, 11(2). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Risti, S. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah Indonesia Timur. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1480. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i12.p04>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.